



JURNAL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA LAMA SEBAGAI TUJUAN WISATA
KOTA SEMARANG**

Penyusun:

Nama : Baruna Bagus P

NIM : D2B 007 010

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

Abstrak

Implementasi Pengembangan

Kawasan Kota Lama Sebagai Tujuan Wisata

Kota Semarang

Kawasan Kota Lama merupakan peninggalan bersejarah dari jaman kolonialisme Belanda. Kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan wisata, terdapat banyak keunikan yang ditunjukkan oleh tempat ini bukan hanya karena tempat tersebut memiliki nilai seni namun juga dari tiap bangunan mempunyai cerita sejarahnya masing-masing dan juga wilayah tersebut seperti menyerupai kawasan eropa, ini dikarenakan pada masanya tempat ini merupakan pusat pemerintahan Belanda. Namun seiring perkembangan zaman kota lama semakin terbengkalai tidak terawat, Kondisi memprihatinkan kota lama ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain karena dari berbagai stokeholder misalnya pihak pemerintah yang belum mampu mengembangkan serta melestarikan, belum adanya investor yang tertarik untuk berinvestasi untuk kota lama, dari segi masyarakat juga terlihat kepedulian yang masih rendah. Faktor lain seperti masalah klasik yakni kondisi rusaknya jalan serta masalah banjir yang masih belum terselesaikan. Kurangnya fasilitas yang memadai juga menjadi perhatian yang perlu ditangani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis. Objek pada penelitian ini adalah Kawasan Kota Lama untuk dapat berkembang sehingga mampu dijadikan obyek wisata unggulan di kota semarang.

Key Words : Kawasan Kota Lama; implemetasi; wisata kota

Abstract

Implementation Policy of Development The Old City Area as a Tourism Destination Semarang City

The Old City Area is a historic relic from the era of Netherlands colonialism. This area has potential as a tourist area, there are many uniqueness shown by this place not only because of the place it has artistic value, but also of every building has a story and history of each region as well as areas like Europe, is due to its time this place used as administrative center of the Netherlands. However, over the time of the abandoned old city is not maintained, poor condition of the old city is caused by many factors, among others, because of the various stakeholder such as the government has been unable to develop and preserve, not the investors who are interested to invest in the old city, in terms of public also looks awareness is still low. Other factors such as the classic problem of the destruction of the road conditions and flooding issues that remain unresolved. Lack of adequate facilities is also a concern that needs to be solve. The method used in this research is the description of the method of analysis. Object of this research is The Old City Area to be developed so as to become tourist attraction in Semarang city.

Key Words: The Old City; implementation; city tour

LATAR BELAKANG

Kota Lama merupakan cikal bakal dari sejarah tumbuhnya kota Semarang, karena dari sinilah ibukota Jawa Tengah ini berasal. Kawasan tersebut pada masa sekarang disebut Kawasan Kota Lama. Kawasan ini juga akrab disebut *Outstadt*. Dan tempat ini tentu memiliki andil dalam nilai historis seiring dengan perkembangannya. Sesuatu yang diciptakan oleh suasana kawasan kota lama adalah adanya penggabungan dari dua generasi yang berbeda namun disatukan pada masa kini sehingga menciptakan suatu atmosfer yang layak untuk dipertahankan karena memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan menimbulkan kesan apik dari masa lampau yang dijalankan pada abad 21 ini. Sebenarnya yang layak disebut Kota Lama Semarang harusnya adalah *Kanjengan*. Namun kompleks *Kanjengan* serta alun-alunnya sudah tak ada, hanya tersisa Masjid Agung Kauman. Sementara apa yang disebut *Little Nederland* adalah kawasan di sekitar Gereja Blenduk dengan berbagai gaya bangunan. Namun Kota Lama dengan keadaan yang sekarang belum dapat membuat popularitas pariwisata kota menjadi unggulan, hal ini terlihat dikarenakan belum adanya dan masih kurang dikembangkannya seni dan kebudayaan khas Semarang sebagai potensi wisata di Kota Semarang, tidak adanya obyek wisata didalam Semarang yang menjadi unggulan membuat banyak turis yang mengalihkan destinasi wisatanya ke daerah di luar Kota Semarang. Hal ini yang membuat agen dan biro wisata di Kota Semarang lebih banyak menjual obyek wisata di luar Semarang, padahal, Kota Semarang memiliki potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata karena memiliki keunggulan dalam wisata kuliner, budaya dan sejarah, serta religi, yang dapat dilirik oleh wisatawan asing.

PEMBAHASAN

Selama periode sebelumnya pada tahun 2000-2010 hingga saat ini pemerintah menetapkan perencanaan untuk menjalankan implementasi program-program untuk Kawasan Kota Lama yang dibedakan menjadi lima prioritas perencanaan program implementasi, antara lain:

- a. Revitalisasi, pemerintah mengalokasikan anggaran APBD Kota Semarang khusus untuk pengembangan Kawasan Kota Lama. Tercatat pada tahun 2009 sebesar Rp 30.000.000,00 tahun 2010 mengalami kenaikan Rp 40.000.000,00 dan pada tahun 2011 tidak mengalami perubahan yakni tetap sejumlah Rp 40.000.000,00. Sedangkan tahun 2012 pemerintah mengalokasikan Rp50.000.000,00 dengan jumlah ini dianggap sangatlah kecil mengingat Kawasan Kota Lama terdiri dari kumpulan bangunan bukan hanya satu bangunan saja. Dengan dana seminim ini bangunan yang direvitalisasi hanya cukup untuk satu bangunan saja. Sebut saja Gereja Blenduk karena bangunan ini termasuk klasifikasi A untuk dilestarikan serta setiap minggunya fungsional sebagai tempat aktivitas ibadah. Sedangkan posisi swasta dan masyarakat diharapkan sebagai pendukung pemerintah dalam artian memfungsikan bangunan sebagai hunian atau lahan usaha. Seperti bangunan tua yang dijadikan tempat usaha rumah makan atau dijadikan kantor maupun pabrik-pabrik milik swasta. Dari masyarakat, masyarakat menghimpun dana sukarela yang berasal dari komunitas atau forum sebagai bentuk kepedulian pelestarian, selain itu juga masyarakat berpartisipasi aktif menggelar *public hearing* untuk mendiskusikan mengenai nasib Kawasan Kota Lama yang disampaikan kepada

pemerintah secara berkala dan berkelanjutan agar. Realitanya pelaksanaan revitalisasi ini memiliki masalah yang cukup krusial, mulai dari dana yang sangat minim hingga komitmen pemerintah yang kurang konsisten mengimplementasikan program tersebut. Bukti konkret yang ditemukan adalah bahwa program revitalisasi selama 4 tahun berjalan revitalisasi hanya dilakukan pada satu gedung yakni gereja GPIB Immanuel (gereja Blenduk), padahal wilayah Kawasan Kota Lama sangatlah luas dan terdiri dari sekitar 108 bangunan yang membutuhkan pemugaran. Konsistensi fokus revitalisasi antara rencana dan pelaksanaan dalam prosesnya memiliki kendala yang bersumber dari minimnya pengalokasian dana yang digulirkan setiap tahunnya untuk melakukan revitalisasi terhadap bangunan-bangunan Kawasan Kota Lama ini.

- b. Konservasi seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa pemerintah kota tidak memiliki cadangan dana khusus untuk konservasi karena sudah terpakai untuk revitalisasi. Semenjak tahun 2009 hingga 2012, anggaran dari sejumlah Rp 30.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00, konservasi belum mendapat alokasi bagian setiap tahunnya. Tindakan untuk melakukan konservasi masih belum terealisasi karena berbagai faktor salah satunya masalah pendanaan. Selanjutnya pemerintah mencanangkan peraturan maupun himbauan untuk masyarakat juga bagi pihak yang melakukan konservasi ini termasuk dari swasta. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur segala pembenahan agar supaya mempertahankan nilai keaslian bangunan sehingga bentuk asli bangunan tetap bernilai historis, maka pihak swasta menjadikan bangunan sebagai lahan usaha dengan tidak meninggalkan atau tanpa merubah bentuk asli dari bangunan tersebut. Sedang masyarakat sebagai pendukung pemerintah diharapkan dapat berperan aktif menjaga untuk mempertahankan nilai keaslian bangunan dengan tidak melakukan

aksi yang merugikan keindahan bangunan, pelarangan dengan bentuk pengrusakan yang diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti larangan keras melakukan coret-coret terhadap lingkungan juga bangunan, agar bentuk asli serta keindahan bangunan agar tetap terjaga bernilai historis

- c. Preservasi sebenarnya preservasi ini hampir sama dengan konservasi yang fokusnya ialah menjaga secara keseluruhan, perbedaannya yakni disini lebih menekankan kepada usaha yang dilakukan secara rutinitas sebagai bentuk pemeliharaan bangunan. Pada kenyataan dilapangan bahwa pemerintah kota Semarang belum memberikan perhatian khusus untuk preservasi. Justru dari BP3 yang baru tahun 2012 ini melakukan pengecatan ulang pada bagian kubah. Bahwa sebenarnya hanya untuk perawatan satu bangunan saja normalnya membutuhkan biaya berkisar Rp70.000.000,00 per tahun, namun kenyataannya pemerintah kota belum mengalokasikan dana sebagai bentuk perawatan secara rutin. Jika dari pihak swasta melakukan pengeluaran rutin yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan keutuhan pada bangunan agar bangunan tetap terawat dan tidak terjadi mangkrak terhadap bangunan, hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat yang dikelola swasta tersebut. Gereja Blenduk yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh para jemaat, dari kegiatan setiap minggu tersebut diadakan sumbangan sukarela untuk pemeliharaan kondisi bangunan. Tercatat oleh pengurus gereja bahwa pada tahun 2011 sumbangan yang didapatkan setiap bulannya dari jemaat berkisar sampai dengan Rp600.000,00 maka keseluruhan yang diperoleh selama satu tahun sejumlah Rp7.000.000,00 jumlah tersebut sebagai perawatan gereja blenduk

- d. Demolisi dilakukan pemerintah dalam rangka kebijakan *final* (akhir) jika bangunan sudah dalam kondisi parah dan tidak memungkinkan untuk dipugar ulang atau akan lebih memakan biaya besar jika dilakukan perbaikan. Bangunan ini dalam kondisi mangkrak biasanya bersumber dari ketidakjelasan pemilikan. Pelaksanaan demolisi tidak memiliki anggaran khusus karena demolisi ini bersumber dari bangunan yang mangkrak dan akan hancur dengan sendirinya, kasus pembiaran terhadap bangunan ini terjadi dikarenakan peraturan daerah yang dianggap tidak memberi kelonggaran dalam merenovasi suatu bangunan dengan menuntut keaslian bentuk bangunan hingga mencapai tingginya biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan. Ketidaksanggupan untuk menjaga dan memelihara kelestarian bangunan menyebabkan pihak swasta meninggalkan bangunan tersebut. Partisipasi masyarakat memberi laporan jika ada bangunan yang sudah tidak layak pakai atau dalam kondisi yang dapat membahayakan publik dan tindakan penghancuran pun dilakukan demi kepentingan publik.
- e. Restorasi merupakan bagian dari kegiatan revitalisasi dan memiliki sumber dana yang sama dengan revitalisasi. Tercatat alokasi restorasi dari tahun 2009 hingga 2013 yakni, pada tahun 2009 tercatat Rp 30.000.000,00, tahun 2010 Rp 40.000.000,00, tahun 2011 Rp40.000.000,00 dan tahun 2012 Rp 50.000.00,00. Juga pelaksanaan program ini dijalankan berbarengan dengan revitalisasi saat dilakukan. Pihak swasta berperan juga dalam usaha pengumpulan unsur-unsur asli yang kemungkinan dapat hilang terutama disebabkan dalam proses terjadinya rehabilitasi pada bangunan tersebut. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk secara sadar mencegah terjadinya tindakan dalam bentuk kriminal seperti pencurian. Meskipun sanksi untuk aturan ini belum jelas atau tegas dan hingga saat ini hanya berupa himbauan pemerintah kota.

Dari keseluruhan program yang direncanakan yang tercatat dari tahun 2009 hingga 2012 ini secara fisik yang telah diuraikan tersebut bahwa sesungguhnya revitalisasi merupakan kunci utama. Dapat dikatakan pengambilan langkah yang tepat untuk merevitalisasi setiap bangunan dalam kawasan secara langsung akan berdampak pada pelaksanaan yang diikuti dengan program lainnya. Namun jika program revitalisasi ini belum atau tidak berjalan dengan optimal maka konservasi, preservasi, demolisi dan restorasi dapat dipastikan sulit untuk dilakukan. Dianggap bahwa sebenarnya program yang lain hanya digunakan sebagai program pendukung apabila revitalisasi sudah dijalankan. Dari pemerintah maupun swasta dapat memfungsikan bangunan miliknya secara maksimal ketika program revitalisasi ini sudah dapat dilaksanakan.

PENUTUP

Dengan memperhatikan kelima program yang ditetapkan serta dilakukan analisis menurut variable dari Teori George Edward III, bahwa kesemua program mulai dari revitalisasi sebagai program utama, dilengkapi dengan program-program tambahan seperti konservasi, preservasi, demolisi serta restorasi maka dapat dikategorikan pengimplementasian dilihat segi komunikasi ditemukan bahwa pemerintah mengkomunikasikan maksud dan rencana pelestarian kawasan dengan menggandeng SKPD terkait yang mengandalkan BPK2L sebagai ujung tombak pengelola dilapangan serta dinas pariwisata kota sebagai media promotor untuk memperkenalkan kawasan secara nasional. Yang kedua menganalisa dari kecendrungan yang berkaitan erat dengan komitmen para pelaksana, ternyata ditemukan terjadinya inkonsistensi pengimplementor terutama walikota sebagai penanggung jawab kesemua program. Walikota hanya mendelegasikan kepada dinas-dinas terkait tanpa membuat terobosan berarti dan fokus hanya kepada masalah klasik yakni banjir yang masih melanda, hingga saat ini tidak ada konsentrasi untuk meremajakan kawasan secara keseluruhan.

Terbukti dengan alokasi anggaran yang tiap tahun sangatlah minim untuk digunakan sebagai dana pemeliharaan kawasan. Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program ialah bersumber dari sumber daya manusia dan non manusia, pemerintah kota memiliki sumber daya seperti Bappeda juga BPK2L namun belum diberdayakan secara optimal, contohnya bahwa BPK2L mengalami kselitan dana namun pemerintah tak kunjung memperbesar alokasi anggaran sehingga berdampak pada BPK2L yang harus mencari

alternatif dana sebagai wujud keseriusan menjaga kondisi kawasan. Dan yang terakhir merupakan struktur yang bersifat top down membuat batasan terhadap dinas-dinas juga badan terkait untuk berkeaktifitas dalam menyusun perencanaan serta menjalankan kebijakan dari atas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dosen Pembimbing

1. Drs. Yuwanto, M.Si, Ph. D.
2. Nunik Retno H, S.sos, M.Si.